

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCEPATAN PROSES
PENANGANAN PERKARA – PERKARA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai
Derajat Magister Program Studi Ilmu Hukum
Minat Utama : Hukum Kebijakan Publik**



Diajukan Oleh :

TRIMO

NIM : S. 310907115

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCEPATAN PROSES
PENANGANAN PERKARA – PERKARA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO**

Disusun oleh :

TRIMO

NIM : S. 310907115


Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Jabatan

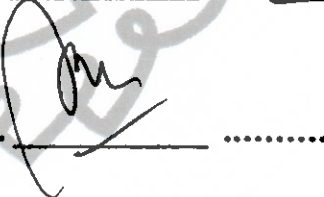
Nama

Tanda Tangan Tanggal

**Pembimbing I Prof.Dr.H.Setiono,SH,MS.
NIP. 130 345 735**



**Pembimbing II W.T.Novianto,SH,MHum.
NIP. 131 472 286**



Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum



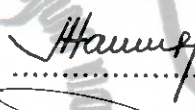


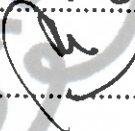
**Prof. Dr H. Setiono, SH. MS.
NIP. 130 345 735**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCEPATAN PROSES
PENANGANAN PERKARA – PERKARA KORUPSI
DI KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO**

Disusun Oleh :

**TRIMO
NIM : S. 310907115**

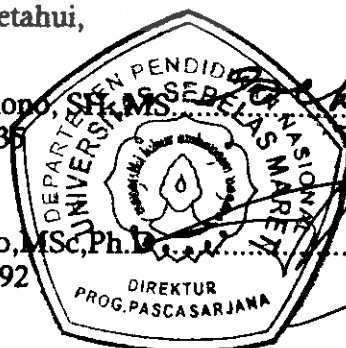
Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Hartiwiningsih ,S.H.M.Hum. NIP. 131 472 287	
Sekretaris	Dr. I Gusti Ayu Ketut RH.S.H.,M.M. NIP. 132 314 332	
Anggota	1. Prof. Dr. H. Setiono, S.H, M.S. NIP. 130 345 735	
	2. W.T.Novianto, SH.,M.Hum NIP. 131 472 286	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Prof. Dr. H.Setiono,
Ilmu Hukum NIP. 130 345 735

Direktur Program Prof.Drs.Suranto, MSc, Ph.D
Pascasarjana NIP. 131 472 192



PERNYATAAN

Nama : **TRIMO**

NIM : **S. 310907115**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul :
” *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Percepatan Penanganan Perkara-Perkara Korupsi di Kejaksaan Negeri Ponorogo* ”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *itasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Pebruari 2009

Yang membuat pernyataan,



TRIMO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul : "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Percepatan Penanganan Perkara-Perkara Korupsi di Kejaksaan Negeri Ponorogo**".

Dalam penulisan ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan dorongan moril serta bantuan yang berupa informasi dari berbagai pihak. Atas bantuan maupun bimbingan yang diberikan kepada penulis, maka dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Suranto, MSc., PhD., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta dan selaku Pembimbing I, yang banyak membantu kelancaran penulis dalam menempuh studi serta dalam menyelesaikan penulisan Tesis.
3. Ibu Dr. Hartiwiningsih, SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Bapak Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis.
5. Bapak / Ibu Tim Penguji Tesis Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
6. Isteri dan anak-anakku tercinta yang merupakan sumber inspirasi dan motivasi dan juga Ibundaku yang selalu mendoakan untuk keberhasilanku .

7. Rekan-rekan mahasiswa angkatan tahun 2007, khususnya Konsentrasi Hukum Dan Kebijakan Publik Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang penulis sampaikan dalam Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga dapat bermanfaat bagi siapa penelitian selanjutnya. Meskipun dalam penulisan ini banyak kesalahan dan kekhilafan seperti halnya peribahasa “ Tiada gading yang tak retak “, maka di mohon saran demi penyempurnaan penulisan ini. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa Alloh SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Amir.

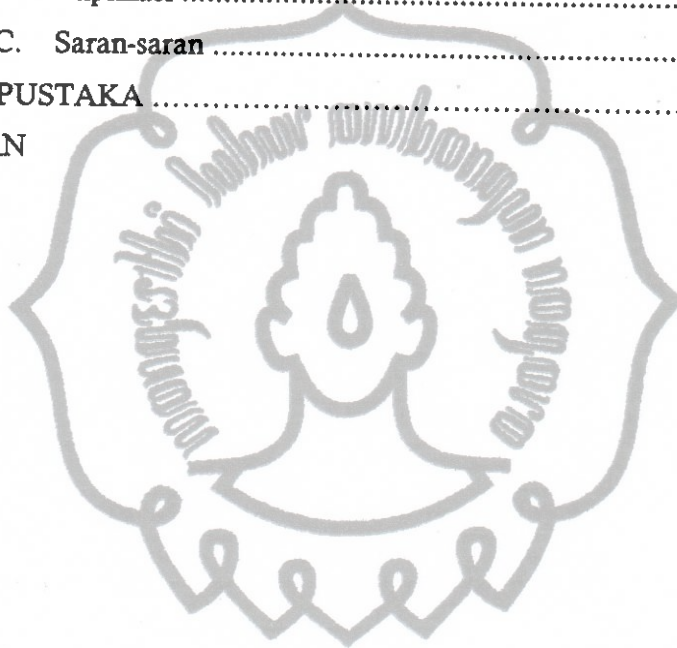
Surakarta, Pebruari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Landasan Teori	9
1. Arti dan Pengertian Korupsi	9
2. Lembaga-lembaga yang Berwenang Dalam Proses Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi	24
3. Teori Bekerjanya Hukum	36
4. Teori Kebijakan Publik	48
B. Kerangka Berpikir	62
BAB III METODE PENELITIAN	64
A. Jenis Penelitian	64
B. Lokasi Penelitian	67
C. Sumber Data	67

D.	Teknik Pengumpulan Data	72
E.	Teknik Analisis Data	70
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A.	Hasil Penelitian	75
B.	Hasil Wawancara	83
C.	Pembahasan	89
BAB V	PENUTUP	107
A.	Kesimpulan	107
B.	Implikasi	110
C.	Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN		



ABSTRAK

Trimono, S.3109071115, 2009. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Percepatan Proses Penanganan Perkara-Perkara Korupsi Di Kejaksaan Negeri Ponorogo

Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Percepatan Penanganan Perkara-Perkara Korupsi Di Kejaksaan Negeri Ponorogo

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah non-doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5. Bentuk penelitian yang digunakan adalah diagnostik. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi percepatan penanganan perkara – perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Ponorogo antara lain disebabkan : (1) Pembuatan Undang-Undang dimana konfigurasi politik hukum SE Jaksa Agung merupakan upaya nyata Kejaksaan khususnya dalam program pemberantasan KKN , disamping membangun kembali citra Kejaksaan dimata masyarakat , dukungan produk legislatif yang kurang memadai baik di Pusat (undang-undang) maupun di daerah (Perda) khususnya dalam pemberian izin bagi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah , Obyeknya rumit karena berkaitan dengan berbagai peraturan dan disiplin ilmu ; (2) Kurang profesionalnya Sumber Daya Manusia , sulitnya menghimpun data karena pada umumnya tindak pidana korupsi baru terungkap setelah lama terjadi , adanya perbedaan persepsi dan interpretasi antara penegak hukum, sarana prasarana yang kurang memadai ; (3) Pelaku (subyek hukum) dilindungi oleh Korps / atasan / teman-temannya , Modus operandinya canggih baik dalam bidang pembukuan, pertanggungjawaban dan menggunakan media elektronik , dan pelakunya menggunakan cara-cara untuk mengaburkan kasus baik dalam bentuk fisik maupun psikis .

Sebagai implikasinya , adanya faktor yang mempengaruhi tidak dapat diminimalisir maka akan berpengaruh luas dalam upaya pemberantasan korupsi terutama di daerah . Disarankan diperlukan peningkatan SDM melalui studi lanjut program strata II (Magister) dan Strata III (Doktor) dan pelatihan yang relevan. Peningkatan dan pengikutsertaan masyarakat melalui peran aktif dan partisipasi masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung dengan memberikan perlindungan bagi saksi dan insentif yang memadai bagi pemberi informasi tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

ABSTRACT

Trimo, S. 310907115. 2009. *The Factors That Influence the Corruption Acceleration Management Process in General Public Attorney of Ponorogo*. Thesis. Postgraduate Program of Sebelas Maret University of Surakarta.

This study aims to identify and analyze the factors that influence the Corruption Acceleration Management Process in General Public Attorney of Ponorogo.

This study uses non-doctrinal research that is based on the 5th law concept. The research was conducted in Diagnostic Analyzes which uses qualitative data.

In accordance with the result of the research as well as the discussion of the related problem managed, it can be concluded that the factors that influence the Corruption Acceleration Management Process in General Public Attorney of Ponorogo are caused by: (1) The law making which the configuration of political law of the Attorney General is one of real efforts of Judiciary particularly to get rid off KKN (Corruption, Collusion, and Nepotism), in addition to rebuilding the image of Judiciary, the less support of either government or regency legislative especially in terms of giving permission to the reagent or the vice reagent, the complicated objects for it has something to do with rules and discipline. (2) The inadequate of human recourse professionalism, the data collecting difficulty since, in general, the corruption is just revealed after a long time ago happened, the perception and interpretation diversity existence among the law enforcement, the inadequate infrastructures. (3) Actors (the law subject) is protected by Corps/ Boss/ Colleagues, the advanced modus operandi in accounting or book keeping, the electronic media use responsibility, and the criminals use many ways to make the cases obscure both physics and non physics.

As the implications, the uneasy minimized existing factors that influence the Corruption Acceleration Management Process will affect the effort of corruption eradication in the local area. It is suggested to improve human resources skills by having good education at "program strata" (Magister), and "Strata III" (Doctorate) and relevant training, improving Human Resource and getting people active directly or indirectly participating in upholding law by providing witnesses protection, and giving informants of criminal occurrence incentives.